



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AMAR NURMANSYAH
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 404204

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 8674 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
8. Tanah Seluas 1242 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
9. Tanah Seluas 2268 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 300.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 50.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	342.866.520
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.217.866.520
III. HUTANG	Rp.	197.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.020.466.520

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.